



KORAN	HAL
Haluan	1&7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

KASUS DANA COVID-19

Polda Periksa Tiga Saksi dari Perusahaan

HALUAN, PADANG — Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat sejauh ini telah memeriksa tujuh saksi dalam penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Di sisi lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengaku telah menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas dugaan temuan tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, penyelidikan atas dugaan *markup* (pemahalan) harga dalam pengadaan *handsanitizer* oleh BPBD Sumbar terus berjalan. Penyelidikan dilakukan dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik).

"Hingga kini sudah tujuh saksi yang diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan perkara ini," ujar Satake di Polda Sumbar, Rabu (24/3).

Satake menjabarkan, tujuh saksi yang dimintai keterangan tersebut antara lain, anggota DPRD Provinsi Sumbar Nofrizon, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman, Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Sumbar Suryadi, salah seorang Bendahara di BPBD Sumbar. Terbaru, penyidik juga sudah meminta keterangan tiga orang dari pihak perusahaan rekanan dalam pengadaan *handsanitizer* tersebut.

Satake menambahkan, penyidik terus

Polda

menalami kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 yang disebut mencapai Rp4,9 miliar itu, dengan terus mengumpulkan data-data serta dokumen pendukung. Termasuk juga, katanya, akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya.

Satake memastikan, jika tim penyidik sudah menemukan unsur pidana dalam pemeriksaan, maka proses pengusutan kasus dugaan Covid-19 akan segera ditindaklanjuti. Selain itu, Kapolda Sumbar juga telah menginstruksikan agar kasus tersebut diusut hingga tuntas.

Ada pun terkait kritikan Koalisi Masyarakat

Sumbar Antikorupsi atas proses penyelidikan di Polda Sumbar yang dinilai lamban, Satake mengaku tidak keberatan. Sebab, menurutnya yang terpenting adalah, tim penyidik terus bekerja mengusut dugaan potensi penyelewengan anggaran Covid-19 itu.

Serahkan ke Sekda

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi tidak berkomentar banyak saat ditanya terkait perkembangan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 BPBD Sumbar, serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK Sumbar dan

Pansus DPRD Sumbar. Ia menyatakan, telah meminta Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti segala rekomendasi tersebut.

"Untuk semua proses penindaklanjutan, itu sudah diserahkan ke Sekretaris Daerah," ujar Mahyeldi, Rabu (24/3).

Sebelumnya, Mahyeldi menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan panitia khusus DPRD Sumbar terkait temuan potensi penyelewengan dana Covid-19 tersebut. "Yang jelas, seluruh rekomendasi dari BPK dan Pansus DPRD Sumbar akan kami tindak lanjut," ujar Mahyeldi saat menemui massa demonstrasi beberapa waktu lalu.

Haluan kemudian berusaha untuk mengonfirmasi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut kepada Sekda Provinsi Sumbar, Alwis, lewat sambungan telfon. Namun, hingga berita diterbitkan, yang bersangkutan belum merespons panggilan masuk.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumbar, terdapat dua rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumbar. Pertama, menuntaskan pengembalian uang sebesar Rp4,9 miliar ke kas daerah. Kedua, memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang terlibat dalam pengadaan *handsanitizer* untuk penanganan Covid-19 di Sumbar.

Mahyeldi sebelumnya menegaskan, pihaknya siap untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang terlibat dalam potensi pemahalan harga

dalam pengadaan sejumlah barang di BPBD Sumbar tersebut. "Sedangkan untuk sanksi, nanti akan kami berikan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Dilirik KPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mengkaji hasil temuan BPK tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, KPK berpeluang untuk turun langsung menangani kasus tersebut. Dengan catatan, dugaan itu terbukti sebagai tindak pidana korupsi, dan tidak sedang ditangani Aparat Penghak Hukum (APH) lain.

Ghufron menyebutkan, KPK juga sudah menerima laporan terkait dugaan penyelewengan dana Covid-19 di Sumbar yang mencapai Rp4,9 miliar itu. "Kami sudah terima laporannya. Tapi belum kami analisis lebih lanjut," katanya.

Meski begitu, ia memastikan bahwa KPK akan memperlajari lebih lanjut laporan tersebut, untuk memastikan dugaan kasus yang dilaporkan itu, apakah termasuk tindak pidana korupsi atau tidak. Di samping itu, juga untuk memastikan apakah KPK memiliki kewenangan atau tidak dalam penanganan kasus tersebut.

"Jika dari analisis sementara, kasus ini terbukti sebagai tindak pidana korupsi, tetapi jika bukan wewenang KPK, maka kasus ini akan ke instansi yang lebih berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan," ujarnya lagi. (h/mg-fdi/mg-dar)